

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

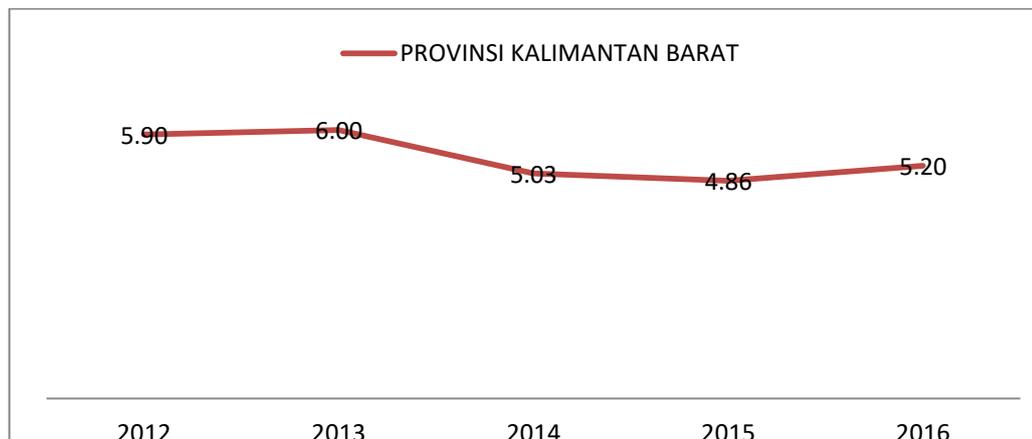
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang merupakan semacam kunci keberhasilan bagi suatu Negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses terjadinya kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang (Hudiyanto, 2017). Pembangunan ekonomi nasional juga harus dilakukan secara berkepanjangan oleh suatu Negara agar menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Di dalam sebuah proses pembangunan ekonomi tentu harus memiliki suatu tolak ukur untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut, oleh karena itu pembangunan harus memiliki suatu indikator dalam penentuan hasil akhirnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi yang sering diidentikan sebagai tolak ukur sejauhmana aktivitas perekonomian bergerak.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan produk nasional GNP/GDP karena adanya peningkatan kuantitas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu (Hudiyanto, 2017). *Gross National Product* (GNP) adalah seluruh penghasilan yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki sebuah negara dimanapun lokasinya, sedangkan *Gross Domestic Product* (GDP) adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi yang beralokasi dalam negeri dari mana pun asal faktor produksi tersebut. Pada umumnya dalam

menilai baik buruknya perekonomian sebuah Negara, indikator yang sering digunakan adalah GDP.

Pertumbuhan ekonomi nasional sesungguhnya tidak terlepas dari peranan wilayah sub-nasional. Dalam dunia tanpa batas, *region state* akan menggantikan *nation state* sebagai pintu gerbang memasuki perekonomian global (Kuncoro, 2013). Oleh karena itu peranan ekonomi regional tampaknya semakin mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional. Bila dalam sebuah perekonomian nasional dinilai berdasarkan perkembangan *GDP*, maka dalam perekonomian regional, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan sebagai indikator dalam menilai perekonomian regional. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti Kalimantan Barat ikut andil dalam menunjang keberhasilan perekonomian nasional. Telah disebutkan di atas bahwa untuk menilai perkembangan perekonomian regional dapat dilihat dari perkembangan PDRB daerah tersebut. Oleh karena itu untuk melihat perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat pada grafik 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

### GRAFIK 1.1

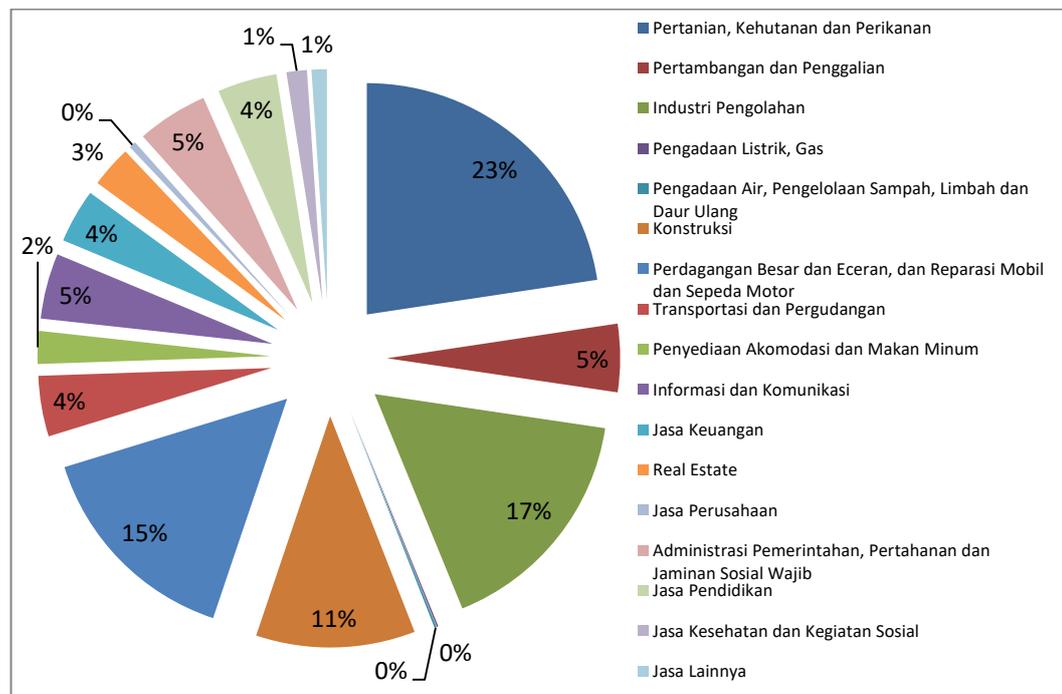
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016 (Persen)

Grafik 1.1 menunjukkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pada grafik 1.1 titik laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 6% dan titik pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,86%.

Bila melihat *trend* dari satu region provinsi selama lima tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki PDRB yang dikatakan cukup baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam menggali dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial dalam

rangka meningkatkan perekonomian daerahnya secara optimal dengan strategi pembangunan yang baik.

Bila dilihat dari PDRB Provinsi Kalimantan Barat, sektor yang mendominasi adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selain sektor tersebut sektor yang memiliki sumbangan terbesar lainnya adalah Sektor Industri Pengolahan dan dilanjutkan dengan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Gambar 1.1 menyajikan diagram besaran kontribusi tiap sektor yang menyumbang dalam PDRB Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016.



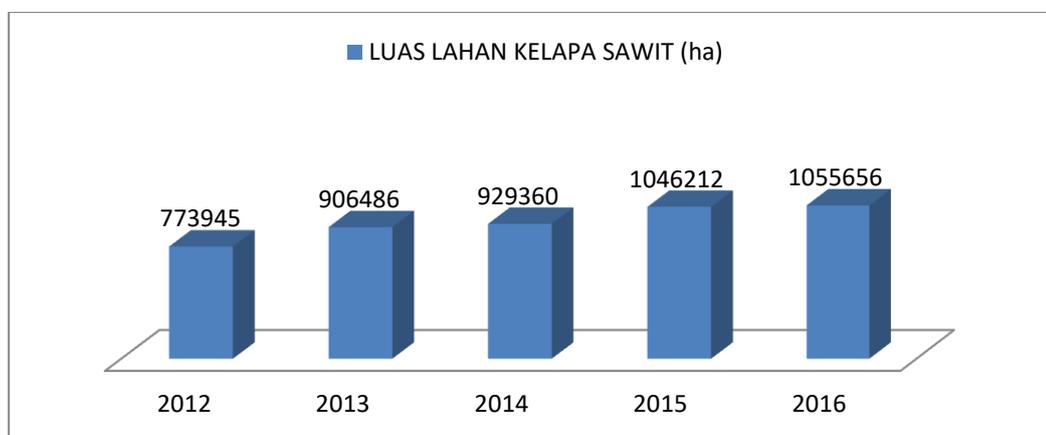
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (diolah)

### GAMBAR 1.1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang paling mendominasi dengan menyumbang sebesar 23% dalam PDRB Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian yang mendominasi di Provinsi Kalimantan Barat adalah sektor primer yang merupakan sektor ekonomi dimana dasar aktivitasnya melibatkan dan menggunakan sumber daya alam secara langsung.

Dewasa ini, lahan produktif yang ada di Kalimantan Barat telah dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat juga mencatat bahwa dalam skala perkebunan, produksi kelapa sawit merupakan produksi terbesar dan ditunjukkan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang selalu konsistensi dalam perkembangannya. Perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit dapat dilihat dalam grafik 1.2 sebagai berikut.

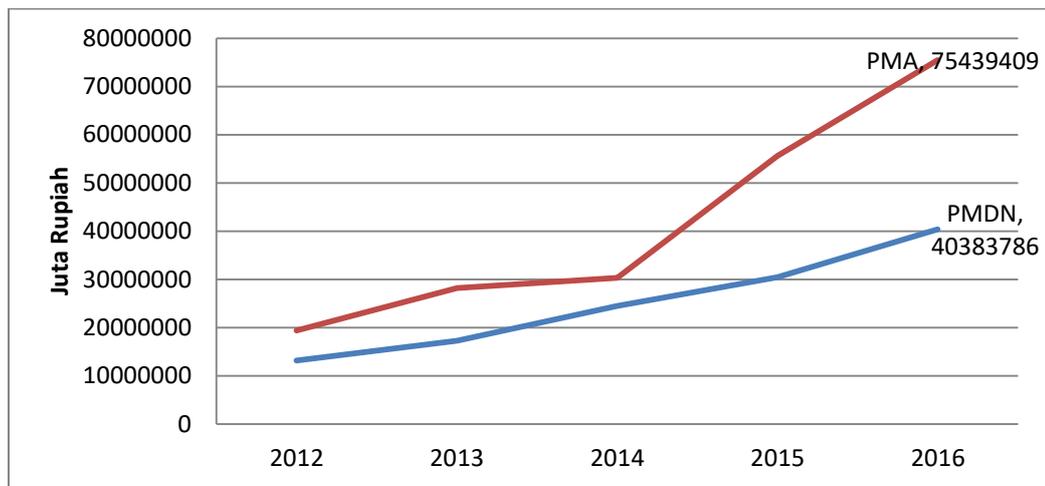


Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

**GRAFIK 1.2**  
Perkembangan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016 (Ha)

Grafik 1.2 menggambarkan bahwa perkembangan luas lahan perkebunan sawit dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami perluasan hingga menyentuh angka 1.055.656 ha pada tahun 2016. Perkebunan kelapa sawit secara kasat mata memang menjadi lahan produktif yang mendominasi di Provinsi Kalimantan Barat karena dipandang sebagai usaha yang menjanjikan. Dalam konsep faktor produksi, tanah atau sumber alam merupakan faktor pendukung yang dianggap penting. Semakin banyak sumberdaya alam tentunya produksi suatu Negara akan semakin tinggi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat output di daerah, dilanjutkan dengan berkembangnya perekonomian daerah ke arah yang lebih baik.

Provinsi Kalimantan Barat termasuk provinsi yang memiliki sumberdaya alam yang memiliki prospek bagus kedepannya. Terutama dalam hal perkebunan kelapa sawit yang terkenal sebagai primadona di Provinsi Kalimantan Barat. Keadaan tersebut akan memungkinkan adanya aktivitas penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang besar, karena banyaknya ketersediaan bahan mentah dari sumberdaya alam yang tersedia serta potensi-potensi lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan *trend* perkembangan PMDN dan PMA yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

### GRAFIK 1.3

#### Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Grafik 1.3 menunjukkan *trend* perkembangan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dari tahun 2012 sampai tahun 2016, nilai investasi di Provinsi Kalimantan Barat, baik PMDN maupun PMA selalu mengalami peningkatan, dan diketahui bahwa nilai PMA lebih tinggi dibandingkan nilai PMDN. Pada tahun 2016 nilai PMDN di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 40.383.786 juta rupiah. Sedangkan nilai PMA adalah sebesar 75.439.409 juta rupiah.

Ketersediaan stok modal dipandang perlu kiranya agar dapat menunjang produktivitas berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara terus menerus. Selain tersedianya modal, faktor pendukung dalam dinamika pertumbuhan ekonomi adalah adanya sumberdaya manusia atau peranan penduduk di wilayah tersebut. Penduduk sering diidentikkan dengan tenaga kerja yang berperan dan memungkinkan Negara atau wilayah tersebut untuk melakukan

produksi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif. Dengan kata lain, semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka output hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu dan akan mendorong kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

#### **GRAFIK 1.4**

Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016 (jiwa)

Grafik 1.4 menggambarkan perkembangan jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat selama lima tahun terakhir. Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat selalu mengalami peningkatan. Titik tertinggi jumlah angkatan kerja di Kalimantan Barat tercatat sebanyak 2.388.758 jiwa pada tahun 2016, dan titik terendah tercatat sebanyak 2.140.166 jiwa pada tahun 2013.

Dalam teori faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor pendukung yang dapat menaikkan tingkat output. Selain itu, teori tersebut juga menjelaskan bahwa

tersedianya faktor lain seperti tanah, modal dan teknologi secara bersama-sama akan mendorong pertumbuhan ekonomi asalkan dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu faktor-faktor produksi seperti tanah atau lahan produktif yang dalam hal ini diwakilkan oleh lahan perkebunan kelapa sawit, modal yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta jumlah angkatan kerja diharapkan dapat terserap dengan baik dalam proses pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis pun tertarik memilih Provinsi Kalimantan Barat sebagai objek penelitian dan terdorong untuk menganalisis tentang seberapa besar pengaruh dan kontribusi faktor-faktor tersebut terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Barat dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986-2016”**.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat pembangunan ekonomi daerah yang begitu luas, oleh karena itu peneliti bermaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dikaji, yaitu pembahasan hanya berfokus pada sejauh mana pengaruh faktor-faktor seperti luas lahan produktif yang dalam hal ini diwakilkan dari lahan perkebunan kelapa sawit, tersedianya modal dari PMDN maupun PMA, dan jumlah angkatan kerja terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Barat tahun 1986-2016.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar pengaruh variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1986-2016?
2. Seberapa besar pengaruh variabel Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1986-2016?
3. Seberapa besar pengaruh variabel Luas Lahan Produktif terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1986-2016?
4. Seberapa besar pengaruh variabel Angkatan Kerja terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1986-2016?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1986-2016.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1986-2016.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel Luas Lahan Produktif terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1986-2016.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel Angkatan Kerja terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1986-2016.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam segi penelitian pada bidang pembangunan ekonomi sehingga nantinya dapat menelaah permasalahan dengan menggunakan teori yang telah didapat selama di bangku perkuliahan.

### 2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan hasil kajian dari sebuah penelitian.

### 3. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi terkait pengambilan kebijakan dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.